

PUBLIKASI KEBERLANJUTAN IAI

8 September
2026

Pesan kepada CEO:

Issue No.
10/X/2026

PSPK 1 dan 2: Membebaskan Perusahaan dari Beban Berat; Memberdayakan Perusahaan untuk Membangun Keunggulan Kompetitif

Selama lebih dari 15 tahun, praktik pelaporan keberlanjutan berkembang melalui berbagai standar, kerangka, dan pedoman yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, dengan tujuan, pengguna, cakupan, dan pendekatan materialitas yang tidak selalu sama. Keberagaman tersebut mencerminkan berkembangnya kebutuhan atas informasi keberlanjutan, tetapi dalam praktiknya juga dapat menimbulkan fragmentasi bagi perusahaan yang harus menavigasi berbagai persyaratan pengungkapan. Ketika kompleksitas tersebut terutama direspons sebagai proses kepatuhan, perhatian manajemen dapat berfokus pada penyelesaian persyaratan pelaporan, sementara keterkaitan antara risiko dan peluang keberlanjutan dengan strategi, kinerja keuangan, dan penciptaan nilai perusahaan belum selalu menjadi perhatian utama.

Dalam konteks tersebut, penerbitan IFRS Sustainability Disclosure Standards—yang terdiri atas IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan IFRS S2 *Climate-related Disclosures*—membawa pendekatan yang lebih terfokus pada informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dapat memengaruhi prospek perusahaan dan relevan bagi pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi beban berat untuk terus melaporkan aspek-aspek keberlanjutan yang tidak relevan

dalam Laporan Keberlanjutan perusahaan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memusatkan perhatian pada informasi yang material, daripada memperlakukan seluruh aspek keberlanjutan sebagai daftar pengungkapan yang seragam.

Namun, perubahan kerangka pelaporan tidak dengan sendirinya mengubah cara perusahaan memandang keberlanjutan. Inersia (keengganan) dapat tetap muncul apabila pelaporan keberlanjutan diperlakukan terutama sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan, bukan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan strategis. Dalam pendekatan seperti ini, hubungan antara risiko dan peluang keberlanjutan dengan strategi, model bisnis, alokasi sumber daya, dan kinerja keuangan belum sepenuhnya dimanfaatkan.



Di Indonesia, OJK tengah merevisi POJK No. 51 Tahun 2017 (POJK 51/2017). Dalam rancangan pengaturan tersebut, Laporan Keberlanjutan mencakup bagian yang disusun dengan mengacu

pada Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK), yang terdiri atas PSPK 1 dan PSPK 2, serta pengungkapan aspek keberlanjutan lainnya sesuai dengan ketentuan regulator. Kedua kelompok informasi tersebut memiliki tujuan yang dapat saling melengkapi. SPK berfokus pada informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dapat memengaruhi prospek perusahaan dan relevan bagi pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum, sementara ketentuan regulator dapat mencakup informasi keberlanjutan yang dibutuhkan untuk tujuan kebijakan dan kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas.

Perkembangan ini memberikan sinyal yang semakin jelas bahwa pelaporan keberlanjutan tidak hanya menjadi bagian dari kepatuhan regulasi, tetapi juga semakin terhubung dengan informasi yang digunakan untuk menilai prospek dan ketahanan perusahaan.

SPK memprioritaskan aspek keberlanjutan yang paling praktis untuk diukur dan memiliki keterkaitan yang jelas serta transparan dengan pengukuran keuangan; contohnya, emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Banyak negara, termasuk Indonesia, telah memiliki perdagangan GRK di pasar masing-masing negara. Selain itu, regulasi mengenai pajak karbon juga telah berlaku di berbagai negara.

SPK memiliki persyaratan pengungkapan untuk metrik berbasis industri. Oleh karena itu, standar ini membebaskan direksi di berbagai jenis industri untuk menentukan sendiri target keberlanjutan dan aspek keberlanjutan yang relevan bagi setiap perusahaan dengan tetap memenuhi persyaratan SPK dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Penting bagi para CEO untuk melihat bahwa **laporan keberlanjutan adalah alat komunikasi korporat** untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menganalisis risiko dan peluang terkait keberlanjutan sebagai bagian dari strategi

perusahaan secara keseluruhan. Keterkaitan antara target ESG atau keberlanjutan perusahaan dan strategi keberlanjutan dengan target dan strategi perusahaan secara keseluruhan sangatlah penting. Tidak banyak perusahaan, bahkan para pemenang berbagai penghargaan keberlanjutan, yang telah menjelaskan keterkaitan ini secara jelas.

Memahami keterkaitan antara keberlanjutan dan strategi menyeluruh perusahaan **akan menjadi pendorong energi (*energizer*)** bagi seluruh organisasi untuk merangkul praktik keberlanjutan—yang merupakan tujuan akhir dari diwajibkannya laporan keberlanjutan—dan untuk membuka pikiran para pelaku bisnis bahwa bisnis dapat dijalankan secara bertanggung jawab sekaligus meningkatkan nilai perusahaannya.

Berikut adalah beberapa tips bagi CEO untuk menerapkan SPK:

1. Dari mana kita memulai? Pendekatan *top-down* terlebih dahulu.

Tugas paling penting dan paling sulit bagi suatu perusahaan dalam menerapkan keberlanjutan adalah memahami arah strategi keberlanjutan dan keterkaitannya dengan target operasional. Penting untuk diingat bahwa strategi keberlanjutan perusahaan harus diintegrasikan ke dalam strategi operasionalnya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki energi dan antusiasme untuk menerapkan kegiatan keberlanjutan.

Mari kita mulai dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 🌱 Apa konsekuensi keberlanjutan dari Misi dan Visi perusahaan Anda?
- 🌱 Apa slogan (*tagline*) perusahaan Anda, dan bagaimana Anda mengenali aspek-aspek keberlanjutan yang selaras dengan slogan ini, misi perusahaan, dan visi perusahaan Anda?

Temukan keterkaitan apa pun yang dapat menghubungkan hal-hal tersebut dengan Misi dan Visi keberlanjutan Anda. Harap diingat bahwa sebagai perusahaan komersial (*for-profit*), keberlanjutan hanyalah sebagian dari apa yang membentuk perusahaan Anda. Bukan berarti arah operasional Anda berada di bawah tujuan keberlanjutan Anda.

2. Lakukan tinjauan holistik atas keterkaitan antara risiko dan peluang perusahaan secara keseluruhan dengan identifikasi risiko dan peluang keberlanjutan Anda.

Dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas, emiten diwajibkan oleh regulasi OJK untuk mengungkapkan faktor risiko serta informasi mengenai kegiatan usaha, kecenderungan, dan prospek usaha dalam prospektus—bisa dilihat sebagai risiko dan peluang operasional perusahaan. Faktanya, perusahaan dengan tata kelola korporat yang baik (*good corporate governance*) akan memiliki siklus berkala untuk menganalisis risiko dan peluang operasional perusahaan. Penentuan atau peninjauan analisis risiko dan peluang dilakukan dengan menjalankan pemindaian kondisi eksternal (*external condition scanning*) yang digabungkan dengan analisis kekuatan dan kelemahan organisasi internal.



Pemindaian kondisi eksternal akan mencakup perubahan teknologi yang memengaruhi perusahaan, situasi geopolitik, kondisi ekonomi umum, dinamika industri (termasuk persaingan),

perubahan sosial dan budaya, serta lingkungan hukum dan regulasi. Pemindaian kekuatan dan kelemahan organisasi akan mencakup analisis kekuatan atau kelemahan keuangan, struktur dan sistem sumber daya manusia (*human capital*) untuk menghadapi tantangan organisasi, serta ketangguhan kebijakan, sistem dan prosedur organisasi. Analisis komprehensif ini akan menghasilkan pemetaan risiko dan peluang bagi seluruh perusahaan.

PSPK 1 menetapkan kerangka pengungkapan risiko dan peluang terkait keberlanjutan serta mendorong keterkaitannya dengan proses manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan praktik bisnis saat ini, terlalu sering terlihat bahwa analisis risiko dan peluang keberlanjutan suatu perusahaan tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan risiko dan peluang perusahaan secara keseluruhan.

Pemetaan yang mendeskripsikan keterkaitan antara risiko dan peluang keberlanjutan, sebagai deskripsi lebih lanjut dari risiko dan peluang perusahaan secara keseluruhan, sangatlah diperlukan.

Contoh Kasus: Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin mencantumkan risiko harga energi yang tinggi atau tingginya biaya transportasi/logistik sebagai salah satu risiko operasional utamanya; namun, risiko emisi GRK dianggap rendah. Meskipun hal ini mungkin terjadi, penjelasan mengenai mengapa keterkaitannya demikian perlu dikomunikasikan dan dijelaskan kepada calon investor.

Contoh lainnya adalah anggapan adanya peluang bagus untuk meningkatkan cadangan area pertambangan tanpa mempertimbangkan bahwa lokasi cadangan tersebut berada di dekat daerah suaka nasional.

Tidak ada risiko dan peluang keberlanjutan yang berada di peringkat tertinggi di suatu perusahaan dapat berdiri sendiri tanpa keterkaitan yang jelas dengan risiko dan peluang perusahaan yang bersangkutan secara keseluruhan.

3. Tentukan target dan peta jalan untuk mencapai target keberlanjutan, merencanakan perjalanan keberlanjutan.

Berbeda dengan standar keberlanjutan lain yang meminta perusahaan melaporkan ratusan aspek keberlanjutan yang cenderung bersifat *checklist*, SPK mengharuskan perusahaan mengungkapkan informasi material mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek perusahaan, yaitu arus kas, akses terhadap pendanaan, atau biaya modal dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Ini berarti direksi menentukan arahnya sendiri, targetnya sendiri, dan peta jalannya sendiri dalam perjalanan keberlanjutan perusahaan. Tidak ada resep kaku bahwa segala sesuatu, baik yang relevan maupun yang tidak relevan, harus diungkapkan.

Materialitas berkaitan dengan informasi yang diungkapkan. Informasi dianggap material jika penghilangan, salahsaji, atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan pengguna utama berdasarkan laporan informasi keuangan bertujuan umum. Pengguna utama mencakup investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya, baik yang ada saat ini maupun yang potensial. Definisi ini umumnya dikenal juga dengan pendekatan *outside in* dengan *single materiality*. SPK tidak mewajibkan penerapan *double materiality*.

Risiko dan peluang terkait keberlanjutan, serta topik pengungkapan dan metrik yang relevan, dapat berbeda antarindustri. Untuk membantu mengidentifikasi risiko dan peluang tersebut, PSPK 1 mensyaratkan perusahaan merujuk dan mempertimbangkan keterterapan

topik pengungkapan dalam SASB Standards. Dewan Standar Keberlanjutan IAI sedang mengembangkan Panduan Berbasis Industri dalam Penerapan SPK dengan mengacu pada panduan internasional tersebut dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia. Dalam [Draf Eksposur Revisi SPK](#), disyaratkan agar perusahaan terlebih dahulu merujuk dan mempertimbangkan keterterapan Panduan Berbasis Industri tersebut. Jika panduan belum tersedia untuk industri atau aktivitas yang relevan, rujukan berikutnya adalah SASB Standards.

Direksi dapat menggunakan panduan tersebut sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi risiko dan peluang serta menghubungkannya dengan analisis risiko dan peluang perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan perlu menilai keterterapan topik dan metrik berdasarkan model bisnis, aktivitas, serta fakta dan keadaan perusahaan; tidak setiap topik atau metrik otomatis harus diungkapkan. Analisis juga perlu mencakup risiko dan peluang yang belum tercakup dalam panduan tetapi diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek perusahaan. Perusahaan kemudian menentukan informasi material yang perlu diungkapkan mengenai risiko dan peluang tersebut sesuai dengan persyaratan SPK.

Secara lebih sederhana, direksi dapat mempelajari Panduan Berbasis Industri dalam Penerapan SPK atau SASB Standards, setelah menilai keterterapan, direksi menganalisis apakah perlu mengeluarkan risiko dan/atau peluang yang tidak relevan dan tidak material bagi perusahaannya, atau menambahkan risiko dan/atau peluang tambahan untuk dipantau. Cocokkan pilihan-pilihan ini dengan risiko dan peluang perusahaan secara keseluruhan.

Direksi juga dapat meminta departemen keuangan untuk menyiapkan kuantifikasi dampak keuangan dari mitigasi risiko dan peluang keberlanjutan. Gunakan prinsip 80/20: apa 20% tindakan yang berkontribusi paling besar

terhadap keberlanjutan, yang akan memberikan dampak 80% bagi perusahaan dalam memitigasi risiko atau memanfaatkan peluang keberlanjutan dan juga berdampak tinggi bagi nilai perusahaan (dalam bentuk penghematan biaya, kenaikan pendapatan, kenaikan laba ataupun nilai kapitalisasi perusahaan di pasar modal).

Pilihan yang dibuat oleh direksi akan memberikan arah bagi perusahaan, sehingga keseluruhan organisasi melangkah ke tujuan yang sama dan tidak tersesat tanpa target yang jelas.

4. Apa yang dapat Anda lihat dan dapat Anda ukur, dapat menjadi fokus Anda.

Strategi perusahaan secara keseluruhan akan mencakup strategi untuk memitigasi risiko dan peluang keberlanjutan perusahaan. Karena sekarang strategi keberlanjutan perusahaan telah terhubung dengan strategi perusahaan secara keseluruhan, akan jauh lebih mudah untuk menentukan target keberlanjutan perusahaan. Ini adalah bagian dari target perusahaan secara keseluruhan, bukan berdiri sendiri.

Akan jauh lebih mudah pula bagi seluruh organisasi untuk menerjemahkan lebih lanjut target dan strategi keberlanjutan ke dalam divisi atau departemen masing-masing, atau bahkan ke dalam target dan strategi manajer individu.



Jawaban atas pertanyaan ‘apa untungnya bagi saya’ (what’s in it for me) menjadi jelas.

Menghubungkan target dan strategi keberlanjutan dengan target perusahaan secara keseluruhan

akan memberi energi kepada seluruh perusahaan untuk bekerja mencapai target tersebut. CFO yang ditugaskan (bukan dibebani) untuk mengumpulkan data guna memantau kemajuan pencapaian tahapan (*milestone*) target akan mendapatkan dukungan dari seluruh divisi dan departemen—semua orang dalam organisasi—untuk mencapai target dan mengimplementasikan strategi keberlanjutan dan target dan strategi perusahaan secara keseluruhan.

5. Pendelegasian kepada pejabat setingkat di bawah direksi (*second-rank officers*) atau konsultan.

Banyak direksi dengan senang hati menyerahkan tugas menentukan risiko keberlanjutan utama kepada konsultan (yang umumnya dibayar mahal), seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga mengurangi beban kerja direksi. Meskipun praktik ini dapat diterima jika konsultan memahami faktor kunci keberhasilan perusahaan serta risiko dan peluang industri, pada praktiknya tidak banyak—bahkan mungkin tak ada—konsultan keberlanjutan yang memahami risiko khas industri, terlebih lagi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Direksi seharusnya menjadi pihak yang paling memahami aspek-aspek ini, dan merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh untuk memastikan perusahaan bertahan dan berkembang di industrinya.

Mendelegasikan pekerjaan menentukan target dan strategi perusahaan kepada pihak yang tidak memiliki tingkat kompetensi dan akuntabilitas yang sama dengan direksi perusahaan itu sendiri akan menghasilkan keterlibatan yang tidak maksimal (*subpar engagement*), yang tidak akan mengoptimalkan nilai perusahaan.

Ini tidak berarti bahwa memiliki konsultan keberlanjutan tidak akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Faktor kunci keberhasilannya adalah bagaimana bekerja sama dengan konsultan tersebut. Direksi memiliki pemahaman

tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan secara keseluruhan serta dinamika industri tempat ia beroperasi. Konsultan keberlanjutan memiliki pengetahuan teknis tentang cara melaporkan keberlanjutan dan pengukuran apa yang biasanya digunakan oleh industri. Kolaborasi, bukan pendelegasian atau—yang lebih buruk—lepas tangan (*abdication*), adalah kata kuncinya.



Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam praktik bisnis, lebih mudah bagi direksi untuk mempelajari dan memahami aspek-aspek keberlanjutan perusahaan daripada bagi konsultan untuk mempelajari dan memahami operasional perusahaan secara keseluruhan. Mendelegasikan tugas menentukan target keberlanjutan kepada jenis konsultan seperti ini berarti lepas tangan dari tanggung jawab direksi. Secara umum, direksi harus memahami bahwa tugas dan pekerjaan dapat didelegasikan, tetapi tanggung jawab dan akuntabilitas tidak dapat didelegasikan.

Direksi mungkin ingin melibatkan konsultan atau mendelegasikan tugas lebih lanjut kepada pejabat setingkat di bawah direksi hanya setelah direksi memberikan arahan dan menetapkan target secara keseluruhan. Tanggung jawab untuk menerapkan lebih lanjut akan berada pada tim internal perusahaan, bukan pada konsultan. Konsultan akan mendukung tim dengan memberikan masukan keberlanjutan dan memastikan bahwa tenggat waktu terpenuhi.

6. Anggota manajemen puncak mana saja yang harus terlibat dalam menganalisis risiko dan peluang terkait keberlanjutan, target keberlanjutan, dan peta jalan untuk mencapai target keberlanjutan?

Jawabannya pasti sama dengan jawaban atas pertanyaan siapa anggota manajemen puncak yang paling penting dalam menentukan risiko dan peluang perusahaan secara keseluruhan, strategi dan target operasional, serta peta jalan untuk mencapai target tersebut.

Tiga serangkai anggota direksi yang paling penting adalah CEO, CFO, dan COO.

Tergantung pada industri tempat perusahaan berada serta risiko dan peluang keseluruhan yang diidentifikasi, Anda mungkin ingin mengikutsertakan direktur pemasaran, direktur sumber daya manusia (*human capital director*), *cio* (*chief investment officer*), atau direktur teknologi informasi.

CEO memiliki tugas untuk memimpin seluruh perusahaan. CFO bertanggung jawab untuk mengkuantifikasi target, menyiapkan sistem untuk memantau pencapaian, menyiapkan anggaran keberlanjutan, dan melaporkan kemajuan. Kuantifikasi di sini dapat berupa kuantifikasi keuangan maupun non-keuangan. Unit pengukuran, seperti ton ekuivalen CO₂, volume penggunaan air, atau kualitas air limbah, juga harus dikuantifikasi menggunakan target pengukuran non-keuangan. CFO juga memiliki peran penting dalam memastikan keterhubungan antara informasi keberlanjutan dan pelaporan keuangan, termasuk konsistensi data, asumsi, dan dampak keuangan yang digunakan dalam kedua pelaporan tersebut, serta membangun infrastruktur pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan (*internal controls over sustainability reporting/ICoSR*) yang memadai.

COO adalah orang yang sangat penting untuk menentukan dan mendorong upaya keberlanjutan. Dia adalah orang yang memahami risiko dan peluang terbesar di seluruh perusahaan terkait dengan operasional perusahaan. Dia perlu memperluas pengetahuan dan pengertiannya mengenai bagian mana dari operasional perusahaan yang dapat memperoleh dan memberikan manfaat terbesar dari usaha praktek keberlanjutan tertentu yang dijadikan fokus perusahaan. Tanpa keterlibatan dan dukungan penuh COO, energi organisasi Anda tidak akan ada untuk menentukan risiko, peluang, strategi, target, dan unit pengukuran keberlanjutan yang relevan.

7. Manfaat bagi perusahaan.

Tren persyaratan pengungkapan keberlanjutan merupakan tren persyaratan yang berlaku di seluruh dunia. Pemerintah setiap negara menyatakan komitmen atas jumlah kontribusi nasional negaranya (*Nationally Determined Contribution/NDC*) untuk mengurangi emisi GRK. Perusahaan swasta juga diminta memenuhi persyaratan internasional untuk pengungkapan keberlanjutan. Bank diminta oleh The Basel Committee on Banking Supervision Committee (BCBS) — walaupun untuk sementara masih bersifat sukarela — dan juga oleh OJK untuk mengungkapkan risiko iklim. Cepat atau lambat perusahaan yang tidak siap untuk menerapkan tindakan keberlanjutan akan menghadapi tantangan dalam mengakses pendanaan.

Bank, cepat atau lambat akan menganggap perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi keberlanjutan sesuai dengan standar internasional sebagai debitur dengan risiko yang lebih tinggi, sehingga biaya kreditnya (*cost of funds*) akan lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang progresif dalam kegiatan keberlanjutannya, yang menciptakan keunggulan kompetitif bagi mereka sendiri, akan diuntungkan dengan biaya pendanaan yang lebih rendah.



Untuk saat ini, pinjaman terkait keberlanjutan (*sustainability-linked loans*) ditawarkan oleh bank dengan syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan daripada pinjaman tradisional. Tidak semua jenis pinjaman ini menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini merupakan tugas CFO untuk memahami dan menganalisis syarat dan ketentuan pinjaman tersebut.

8. Apakah penerapan dini SPK secara penuh bermanfaat bagi perusahaan kami atau haruskah kita fokus saja pada persyaratan terkait iklim terlebih dahulu?

Hal ini akan tergantung pada kebutuhan perusahaan untuk berkomunikasi dengan calon investor atau penyedia dana Anda. Jika terdapat informasi material mengenai risiko dan peluang selain iklim yang penting bagi calon investor atau penyedia dana, direksi perlu mempertimbangkan manfaat mengungkapkan informasi tersebut lebih awal. Meskipun PSPK 1 memperkenankan pengungkapan hanya terkait iklim selama periode transisi, kelonggaran pelaporan tersebut bukan alasan bagi direksi untuk mengabaikan pengelolaan risiko dan peluang selain iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek perusahaan.

Misalnya, perusahaan menghadapi risiko selain iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospeknya (contohnya, risiko terkait hak asasi manusia), sementara informasi material mengenai risiko tersebut belum diungkapkan karena

perusahaan menggunakan ketentuan transisi untuk mengungkapkan hanya informasi terkait iklim (contohnya, hanya mengungkapkan emisi GRK saja).

Meskipun diperkenankan oleh SPK, pilihan ini dapat membuat calon investor atau penyedia dana belum memperoleh informasi yang mereka perlukan untuk memahami prospek perusahaan secara memadai serta berpotensi melihat hal ini sebagai tindakan yang kurang bertanggung jawab oleh direksi.

Direksi yang mengetahui pentingnya informasi tersebut perlu mempertimbangkan pengungkapan lebih awal agar komunikasi perusahaan dengan investor atau penyedia dana lebih mencerminkan risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan.

Perlu diingat bahwa kemudahan transisi untuk pengungkapan terkait iklim tidak berarti PSPK 1 menjadi standar yang hanya berfokus pada iklim. Ketika perusahaan menggunakan kemudahan tersebut dan hanya mengungkapkan informasi terkait iklim, prinsip dan ketentuan lain dalam PSPK 1 yang relevan tetap berlaku, termasuk misalnya mengenai materialitas dan keterhubungan informasi.

Setelah melaksanakan proses pemikiran yang disebutkan di atas, direksi perusahaan akan memahami dan dapat menentukan risiko dan peluang terkait keberlanjutan utama, strategi untuk memitigasi risiko, target keberlanjutan, dan peta jalan untuk mencapai target keberlanjutan. Semua ini hendaknya terintegrasi dengan baik ke dalam risiko dan peluang, strategi, dan target perusahaan secara keseluruhan.

Kesimpulan

Kesimpulannya, keterlibatan langsung direksi dan pendekatan *top-down* sangat penting di awal proses saat perusahaan menentukan target keberlanjutan, mengidentifikasi risiko dan peluang keberlanjutan, menentukan strategi mitigasi risiko atau strategi untuk meraih peluang, dan memberi energi kepada organisasi untuk menerapkan upaya-upaya yang meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Penyangkalan

Publikasi Keberlanjutan IAI: Seri Pesan kepada CEO ditulis oleh anggota dewan, kompartemen, atau tim teknis di lingkungan IAI. Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan atau posisi resmi DSK IAI. Publikasi ini disusun untuk tujuan diskusi dan bukan merupakan pernyataan atau posisi resmi DSK IAI. Pernyataan dan posisi resmi DSK IAI hanya ditetapkan melalui proses formal sesuai dengan prosedur IAI.

DEWAN PEMANTAU STANDAR KEBERLANJUTAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Rosita Uli Sinaga
Ketua



Prof. Lindawati Gani
Anggota



Jumadi
Anggota



Bobby Wahyu Hernawan
Anggota
Ex Officio Kementerian Keuangan



Indah Iramadhini
Anggota
Ex Officio OJK



Laksmi Dhewanthi
Anggota
Ex Officio Kementerian
Lingkungan Hidup



Lucas Kurniawan
Anggota



Mega Wilastomo
Anggota
Ex Officio Bank Indonesia



Nawal Nely
Anggota

DEWAN STANDAR KEBERLANJUTAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Istini T. Siddharta
Ketua



Arie Pratama
Anggota



Elvia R. Shauki
Anggota



Heru Rahadyan
Anggota Ex Officio Bank Indonesia



Jarot Suroyo
Anggota Ex Officio OJK



Luthfyana Kartika Larasati
Anggota



Nanik Nuryani
Anggota Ex Officio PPPK



Palti Ferdrico TH Siahaan
Anggota



Prabandari I. Moerti
Anggota



Rizkia Sari Yudawinata
Anggota



Susanti
Anggota



Wahyu Marjaka
Anggota Ex Officio Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Yuliana Sudjonno
Anggota

TIM KERJA KEBERLANJUTAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Luluk Widyawati
Ketua



Airlangga Djati M.
Anggota



Angga Pujaprayoga
Anggota



Cita Ayu Pratiwi
Anggota



Desy
Anggota



Dodik Moerdijanto
Anggota



Ika Merdekawati
Anggota



Prof. Iman Harymawan
Anggota



Yohanes Handoko
Anggota